

Transparansi Informasi Kegiatan Pemerintah di Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat

Aprilia A.M. Maukar ¹, Dr. Jeane E. Langkai, M.Si ², Jeane Mantiri S.AB, MAP ³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

*Transparency, Good
Governance, Minahasa.*

Accepted:

Revised :

Published:

This study aims to know and describe how the Transparency of Information on Government Activities in Wawalintouan Village, West Tondano District, with the research method used is qualitative, descriptive. The results of this study stated that, Transparency of Information on Government Activities in Wawalintouan Village, West Tondano District has not run well, where: 1) Some existing officials are still not transparent with some programs, especially regarding assistance programs for the community, 2) The obstacles faced in the transparency of Government Activities in the application of the principle of Open Good Governance are the government itself where there is still a lack of sense of responsibility, commitment from the authorities so that there is no transparency in some programs and information services from the government.

INTISARI

Kata kunci:

Transparansi, Tata
pemerintahan yang
baik, Minahasa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Transparansi Informasi Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat, dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Transparansi Informasi Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat belum berjalan dengan baik, dimana: 1) Beberapa aparat yang ada masih belum transparan dengan beberapa program terutama mengenai program bantuan untuk masyarakat, 2) Hambatan yang dihadapi dalam transparansi Kegiatan Pemerintahan dalam penerapan prinsip Open Good Governance adalah dari pihak pemerintah sendiri dimana masih kurangnya rasa tanggung jawab, komitmen dari aparat sehingga tidak adanya transparansi beberapa program dan pelayanan informasi dari pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik, bersih (clean and governance) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep governance menjadi cita-cita dan dan harapan setiap bangsa. Konsep governance menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintahan). Konsep “government” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai sector di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Tercapainya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan tergantung pada keterbukaan informasi publik. [1]

Menerapkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) bukanlah tugas yang mudah karena banyak hambatan yang menghalangi suatu bangsa untuk mencapainya, termasuk penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang-orang internal yang bermain-main untuk keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan harus bekerja sama untuk mewujudkan dan menanamkan rasa kepedulian terhadap Negara sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dengan tetap berpegang pada hukum atau undang-undang, standar yang telah ditetapkan.

Di semua tingkat pemerintahan, reformasi telah mendorong penerapan tata pemerintahan yang baik. Keterbukaan dan akuntabilitas internal, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, merupakan prasyarat untuk keberhasilan pemerintahan.[2] Sebagai hasil dari tata kelola pemerintahan yang baik, telah dilakukan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan prosedur pengelolaan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kinerja.[3]

Melihat dari situasi pelayanan dari suatu pemerintahan saat ini perlu diterapkan tentang good governance guna untuk mencapai tujuan organisasi yang baik. Dan untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu adanya dukungan dari sumber daya manusia yaitu seperti pegawai yang memiliki sifat dan sikap dari prinsip good governance.

Gagasan tata kelola yang baik diterapkan sebagian besar berkat prinsip transparansi. Akan lebih mudah bagi publik untuk memahami dan mengambil bagian dalam proses aktual yang menarik bagi mereka berkat informasi yang terbuka dan mudah diperoleh. Transparansi informasi akan memungkinkan lebih banyak interaksi sosial antara pemangku kepentingan dan pemerintah.

Sesuai dengan observasi serta penelitian yang telah peneliti lakukan dimana dalam pelaksanaan transparansi yang menjadi salah satu prinsip *good governance* di Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat masih ditemui berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak terlaksananya prinsip transparansi dari *good governance* yang akhirnya berakibat pada kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah masih belum terbuka menyangkut dengan beberapa informasi dan program-program tertentu, tidak adanya media atau juga papan informasi yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk bisa mengakses berbagai informasi yang mana transparansi menyangkut erat dengan pelayanan informasi yang berhak didapatkan oleh setiap kalangan masyarakat, tidak adanya pelaksanaan sosialisasi untuk masyarakat yang ada menyangkut dengan berbagai program dari pemerintah, belum adanya komitmen dan tanggung jawab yang penuh dari pemerintah dalam melakukan kewajiban didasari dari transparansi yang menjadi salah satu prinsip *good governance*. Sehingga dari berbagai permasalahan diatas menyangkut dengan keterbukaan atau transparansi, menyebabkan kualitas pelayanan yang belum maksimal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip *good governance* karna belum terlaksananya salah satu prinsip yang ada dalam *good governance*.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, Karena penelitian ini bersifat deskriptif yang cenderung berkonsentrasi pada proses pencarian makna, maka dasar

penggunaan teori ini agar suatu penelitian dapat sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan juga dengan penelitian kualitatif akan terjadi proses penelitian. diberikan gambaran tentang fenomena hasil pembahasan penelitian.[4] Adapun Fokus Penelitian, yang di ambil oleh peneliti adalah untuk melihat apakah pemerintah sudah menerapkan transparansi dalam pelaksanaan pemerintah, sehingga fokus yang ada yaitu salah satu prinsip *good governance* transparansi. Lokasi Penelitian, Lokasi yang dipilih dan ditetapkan dalam penelitian ini yaitu pada Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu: a) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari fakta di lapangan atau yang diperoleh dari lokasi penelitian. b) Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, berupa dokumen, peraturan perundang – undangan, buku kepustakaan dan sebagainya Teknik Analisis Data, yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik analisis data yaitu: a) Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal – hal pokok atau penting supaya memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian, b) Penyajian Data, Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu penelitian, c) Penarikan Kesimpulan, masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Keabsahan Data, dalam Penelitian ini menggunakan 4 teknik pemeriksaan dalam sugiyono (2014) yaitu: 1) Derajat Kepercayaan (*Credibility*), 2) Keteralihan (*Transferability*) 3) Ketergantungan (*Dependability*) 4) Kepastian (*Confirmability*).[5]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih maka adanya penerapan prinsip *Good Governance* khususnya transparansi di setiap instansi pemerintah terlebih pada setiap kelurahan/desa yang nantinya bisa saling menunjang dalam perwujudan prinsip dan terciptanya pemerintahan yang baik.

Transparansi yaitu Informasi yang harus diungkapkan baik selama proses pengambilan keputusan maupun saat sedang diungkapkan. Dengan adanya penerapan transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat akan menghindari berbagai macam masalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah yang ada.

Berdasarkan fakta yang ada serta dari hasil penelitian, yang ditemukan oleh peneliti bahwa pemerintah masih tidak terbuka dengan berbagai perencanaan dan berbagai program yang mana berupa program bantuan untuk masyarakat, tidak adanya berbagai informasi yang memadai baik dari penyediaan pelayanan informasi mulai dari sosialisasi untuk masyarakat yang ada juga tidak disediakannya papan informasi pada kantor Kelurahan yang berakibat pada sulitnya masyarakat untuk dapat mengakses berbagai informasi yang penting dari pemerintah.

Dari hal ini sudah dapat dilihat bawah transparansi dari pemerintah yang ada pada Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat belum sepenuhnya diterapkan, dimana prinsip *Good Governance* khususnya pada transparansi menyangkut dengan belum adanya berbagai sosialisasi dari perencanaan sampai pada penyediaan wadah atau media serta papan informasi yang sangat penting dan menjadi hak dari masyarakat untuk dapat mendapatkan pelayanan informasi dan keterbukaan dari pemerintah yang ada.

Dapat dijelaskan juga bahwa dari hasil dan data yang ada bahwa pemerintah atau aparat yang ada masih belum memberikan berbagai transparansi informasi kepada semua masyarakat, dimana yang seharusnya semua informasi harus diberikan kepada semua kalangan masyarakat tanpa adanya perbedaan, namun yang ada bisa dilihat dari hasil wawancara yang ada bahwa masih adanya aparat atau sumber daya manusia yang ada dalam struktur organisasi Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat mementingkan beberapa kalangan, serta memprioritaskan kepentingan pribadi dan beberapa oknum yang seharusnya sudah sangat jelas bahwa transparansi ini merupakan keterbukaan untuk menghindari berbagai macam penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

IV. KESIMPULAN

Dari berbagai data dan hasil yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa Transparansi Informasi Kegiatan Pemerintah Di Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat belum berjalan dengan baik, dimana: (1) Beberapa aparat yang ada masih belum transparan dengan beberapa program khususnya menyangkut dengan program bantuan untuk masyarakat, aparat yang ada masih mementingkan beberapa oknum dan menyalahgunakan wewenang, belum adanya ketersediaan wadah, media atau papan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk dapat mengakses dan mendapat pelayanan informasi dari pemerintah secara mudah. (2) Kendala yang dihadapi dalam transparansi Kegiatan Pemerintah dalam penerapan prinsip Keterbukaan Good Governance adalah pada pemerintah itu sendiri dimana masih kurangnya rasa tanggung jawab, komitmen dari aparat dalam hal ini sumber daya manusia dalam melakukan setiap kewajiban yang ada khususnya untuk penerapan transparansi dalam Prinsip Good Governance, sehingga belum adanya transparansi dalam beberapa program dan pelayanan informasi dari pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. B. Kairupan and J. Mantiri, "Openness of Public Information in the Management of Village Funds in North Minahasa Regency," vol. 473, no. Ic55, pp. 1–4, 2020, doi: 10.2991/assehr.k.201014.001.
- [2] M. Mandagi, S. Kairupan, and M. Wullur, "Pengelolaan APBDES di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 2, no. 1, pp. 45–50, 2021, doi: 10.53682/administro.v2i1.1679.
- [3] G. Tumbel, R. Sendouw, and J. Mokat, "Political Accountability through the Legitimacy of the Regional House of Representatives in Regional Regulations Making," vol. 383, no. Ic55, pp. 783–789, 2019, doi: 10.2991/ic55-19.2019.117.
- [4] A. T. O. Rembet, J. E. Langkai, and ..., "Implementasi Kebijakan Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) ...," ... , *dan Pendidik.*, vol. 2, no. 1, pp. 47–62, 2022, [Online]. Available: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/496%0Ahttps://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/496/427>
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.